

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu akuntansi dan praktek akuntansi dalam lingkungan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang integral. Namun, ilmu akuntansi dan praktiknya diluar badan usaha, seperti pada institusi keagamaan yang sangat terpinggirkan. Padahal praktek akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sangat penting bagi setiap organisasi. Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), mesjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Konsistensi, Akuntabilitas dan Transparansi merupakan tiga pilar manajemen keuangan masjid yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya.<sup>1</sup>

Selama ini, tempat ibadah hanya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan atau melayani aktivitas ritual peribadatan, seperti sholat, berdoa, berdzikir, dan lain sebagainya. Masjid adalah tempat ibadah sekaligus pusat peradaban umat islam. Dalam mengelola mesjid yang perlu mendapat perhatian adalah masalah keuangan dan surat menyurat. Pengurus mesjid harus sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan masalah ini, terutama masalah pengelolaannya. Kalau pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan secara baik, itu pertanda pengurus mesjid merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab.<sup>2</sup>

Sebenarnya tempat ibadah apabila disadari sebagai salah satu bentuk organisasi yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan

---

<sup>1</sup> Andriani Amir. Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelola Keuangan Masjid Al Markaz Al Islami Berdasarkan Psak 109 (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar ,Makassar : 2018) Halaman 2

<sup>2</sup> Halim, Abdul. Dan Kusufi, M.Syam. *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2018). Halaman 451

kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak kalah strategisnya dengan jenis organisasi publik lainnya. Maka di rasa penting untuk memberi perhatian pada pengelolaan tempat ibadah.<sup>3</sup>

Setiap pengurus masjid diharapkan menyusun laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencatat dengan jelas dari mana uang masuk dan penggunaan dana diunitnya masing-masing. Dibeberapa mesjid, kebiasaan membuat laporan keuangan yang tertib dan teratur berjalan dengan baik. Laporan itu biasanya, sekali dalam sebulan, disampaikan pada waktu jum'at kepada para jamaah.<sup>4</sup>

Namun, masih ada masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal ini merupakan yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber dana yang diberikan pada mesjid sudah disalurkan dengan benar. Oleh karena itu, masjid sebagai salah satu organisasi harus dapat mempertanggung jawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Pengelolaan sumber dana mesjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Karena masjid bisa jadi pusat aktivitas yang meliputi berbagai bidang, seperti Pendidikan, ekonomi, social, budaya, dan hukum. Jika hal ini mampu dijalankan di tempat ibadah, maka akan menciptakan kesejahteraan lahir (fisik) dan kesejahteraan batin (emosional dan spiritual). Inilah yang membedakan dengan organisasi publik lainnya. Oleh karena itu tempat harus disadari dan dimaknai sebagai sebuah organisasi, karena setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang akan dicapai.

Permasalahan Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Sub Bab Ini Yang Akan Diuraikan Terkait Dengan Per- Masalah Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid.<sup>5</sup>

## 1. Kelemahan Pengelola Keuangan Masjid

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup>Andriani Amir. Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelola Keuangan Masjid Al Markaz Al Islami Berdasarkan Psak 109 (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar ,Makassar : 2018) Halaman 2

<sup>5</sup> Sitompul, Mhd. Sahman ,, Dkk. Akuntansi Masjid Febi Uinsu Press Medan: 2015 Halaman 5

- a. Kelemahan dalam memaknai yang terkandung dalam QS 282
  - b. Kelemahan dalam mengimplementasikan QS 282.
2. Kelemahan di bidang Akuntansi Syariah;
- a. Ketidaktahuan tentang arti pencatatan dan dokumentasi dalam bertransaksi sesuai kaidah syariah;
  - b. Ketidaktahuan tentang akuntansi syariah; dan
  - c. Ketidaktahuan dalam membuat pertanggungjawaban yang baik dan benar sesuai kaidah akuntansi syariah.

Akibat dari kelemahan-kelemahan yang terjadi maka timbul kesenjangan. Secara garis besar kesenjangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan mesjid adalah:

- a. Kesenjangan pengetahuan sumber daya manusia pengelola dalam memaknai yang tersirat dan tersurat dalam QS 282;
- b. Kesenjangan pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan dan akuntansi syariah.

Kesenjangan pengetahuan SDM dalam memaknai syariat dalam QS 282, dan bidang manajemen keuangan sektor publik serta akuntansi syariah sangat jauh tertinggal. Hal ini terjadi disebabkan oleh:

- a. Latar belakang pendidikan SDM yang diberi amanah kurang menyentuh kebutuhan;
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat karena adanya penemuan baru;
- c. Perkembangan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi sistem manajemen Keuangan:

Secara khusus pada bidang akuntansi syariah kesenjangan dipicu oleh:

- a. Sejak masa kerajaan, penjajahan Belanda, penjajahan jepang serta awal kemerdekaan, semasa orde lama, begitu juga pada masa orde baru, pola yang dianut pada sektor publik tidak diharuskan untuk menerapkan akuntansi, hanya menganut pencatatan tunggal (single entry) tidak ada standar, hanya melaporkan realisasi kas saja.

- b. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia tidak diperkenalkan yang namanya akuntansi, sehingga pertanggungjawaban sesuai kaidah QS Albaqarah ayat 282 terlupakan.
- c. Para ulama belum memaknai secara mendalam arti QS Albaqarah ayat 282 sebagai suatu kewajiban, hanya dipersepsikan yang menyangkut utang piutang saja, tidak memaknai transaksi dalam bermuamalat secara komprehensif yang memerlukan akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan baik pribadi, keluarga maupun organisasi Islam.
- d. Kurangnya ilmuwan yang menggeluti dan kurangnya sosialisasi terhadap ilmu akuntansi syariah sebagai kebutuhan, baik dalam menata hidup dan kehidupan maupun sebagai alat pengendali dan pertanggungjawaban.
- e. Terlambatnya pendidikan tinggi agama Islam mendalami dan memaknai QS Albaqarah ayat 282 yang menjadi turunannya adalah ilmu akuntansi, yang sudah berkembang sejak zaman khalifah di dunia Barat yang asalnya dari Timur Tengah.

Dari ungkapan mengenai kesenjangan di atas, terdapat sejumlah pernyataan yang dapat diidentifikasi sehubungan dengan penyelenggaraan QS Albaqarah ayat 282, terutama menyangkut manajemen keuangan dan akuntansi sebagai alat pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pernyataan-pernyataan yang menyangkut QS Albaqarah ayat 282 berkaitan dengan pencatatan dan dokumen sebagai bukti pencatatan yaitu;<sup>6</sup>

- a. Penyajian dokumen transaksi sebagai bukti telah dilakukan pencatatan dalam bermuamalat belum terlaksana sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>
- b. Para pelaku pengurus dan pelaksana pengelola keuangan mesjid tidak berlatar-belakang pengetahuan bidang manajemen keuangan.

Pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan mesjid yaitu:

- a. Semua transaksi belum didukung oleh sistem yang memadai;
- b. Perlakuan akuntansi dengan pembukuan ganda belum diterapkan;
- c. Informasi keuangan yang handal dan tepat waktu belum dapat

---

<sup>6</sup> Ibid Halaman 6

<sup>7</sup> Ibid Halaman 7

dihasilkan;

- d. Para pengurus dan petugas mesjid tidak memahami akuntansi;
- e. Prasarana teknologi informasi belum dimiliki untuk mengoperasikan sistem akuntansi yang handal.

Di Aceh Tenggara, ada satu mesjid yang indah dan megah sekaligus menjadi pusat peradaban islam di Indonesia bagian barat. Namanya Masjid Agung At-Taqwa. Sesuai dengan namanya, Agung dalam bahasa Indonesia yang berarti Mulia. Masjid ini juga sangat dimuliakan oleh masyarakat Aceh, Khususnya Aceh Tenggara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan alat organisasional, seperti dalam hal pengelolaan keuangan adalah akuntansi. Disini peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan keuangan, yang mana variabel yang akan diujia adalah konsistensi, akuntabilitas dan transparansi.

Konsistensi merupakan prinsip akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. Perubahan kadang dimungkinkan dibenarkan agar laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan organisasi yang sebenarnya dan untuk menghindari informasi yang menyesatkan. Ketidakkonsistenan dalam penyajian serta penyusunan laporan keuangan akan menyesatkan pemakaian laporan, juga berpengaruh bagi investor untuk mengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya. Dan secara otomatis juga dapat mengurangi nilai perusahaan tersebut.

BERIKUT INDIKATOR KONSISTENSI :

- 1) Konsistensi merupakan prinsip akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. Jadi indikatornya adalah standar akuntansi yang diterapkan.
- 2) Penyajian laporan keuanga sesuai standar akuntansi.
- 3) Penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi.

Permasalahan yang sering terjadi pada konsistensi Pengelolaan Keuangan Masjid adalah Pengelolaan dan pencatatan keuangan mesjid masih sederhana yang masih sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran mesjid yang di tulis tangan pada buku laporan keuangan.

Mesjid masih ada yang belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK seperti penelitian terdahulu pada penelitian Ayu Yolanda (2018)\_Penerapan Isak 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Masjid Nur Iman Kenagarian Kumango. karena dalam pembuatan laporan keuangan di masjid Nur Iman Nagari Kumango hanya mengacu pada laporan keuangan masjid pada umumnya. Dan pada penelitian Dwi Putri Ramadani “Dampak Penerapan ISAK 31 Terhadap Kebijakan Akuntansi Dan Akun- Akun Laporan Keuangan ( Case Studi Pada Pt Solusi Tunas Pratama). Di sini perusahaan sudah membuat kebijakan untuk mengkalrifikasi aset namun, masih ada beberapa perusahaa yang belum melakukan kebijakan berdasarkan ISAK 31

Jadi, berdasarkan uraian diatas Konsistensi dalam sektor public menuntut untuk entitas sektor publik melaksanakan standar akuntansi sector public yaitu ISAK 35 tetang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dan ISAK 31 interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi property investasi.

Akuntabilitas pada organisasi peribadatan, pada organisasi publik termasuk organisasi keagamaan, pengelola (pengurus dan pengawas) organisasi bertanggung jawab kepada umat/warga atau rapat dengan warga masyarakat yang menggunakan organisasi keagamaan. Pertemuan ini diadakan secara berkala atau dalam waktu tertentu. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak hak publik.

Permasalahan yang terjadi adalah karenakan oleh beberapa factor yaitu bahwa akuntabilitas financial belum memenuhi standar yang sudah diberlakukan secara umum,rendahnya sumber daya manusia yang memeiliki kemampuan kompetensi dibidangnya serta belum memaksimalkan penggunaan teknologi dengan baik. Prosedur dalam pengelolaan zakat terdiri dari penerimaan zakat, pengeluaran zakat, dan pelaporan zakat. Alur bagian zakat harus mampu menggambarkan pencatatan dalam buku sumber penerimaan dan pengeluaran mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat. Output dari sistem pengelolaan zakat adalah Laporan keuangan zakat yang disusun berdasarkan PSAK 109 Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI, 2011). Laporan keuangan yang dimaksud meliputi: Neraca (Laporan posisi keuangan); (b) Laporan Perubahan Dana; (c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan; (d) Laporan Arus Kas; dan (e) Catatan atas laporan keuangan. Sesuai dengan UU No. 23/2011, BAZNAS menjadi koordinator dalam mengelola zakat tingkat nasional, termasuk mengkoordinir pengumpulan laporan secara berkala oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333/2015 berisi tentang Pedoman Pemberian izin Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki wewenang dalam merekomendasikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memiliki izin resmi maupun tidak memiliki izin resmi.<sup>8</sup>

Transparansi pengelolaan keuangan merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dan dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang actual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk<sup>9</sup> dan harus mengaju pada standar sector public yaitu ISAK 35 dan ISAK 31: seperti pada jurnal Dwi Putri Ramadani “Dampak Penerapan Isak 31 Terhadap Kebijakan Akuntansi Dan Akun- Akun Laporan Keuangan ( Case Studi Pada Pt Solusi Tunas Pratama). Ayu Yolanda (2018)\_Penerapan Isak 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Masjid Nur Iman Kenagarian Kumango.

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi dan anggaran),
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaporan keuangan. Maka penelitian ini berjudul “ **Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid At-Taqwa Di Kabupaten Aceh Tenggara**”

## **B. Identifikasi Masalah**

---

<sup>8</sup> SUGINAM, DAN SAPARUDDIN SIREGAR AKUNTABILITAS FINANSIAL BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM JURNAL MANAJEMEN, EKONOMI, KEUANGAN DAN AKUNTANSI VOL 1, NO 2, JANUARI 2020, PP. 95-98 E-ISSN 2686-4363 HALAMAN 2

<sup>9</sup> Ibid



Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), mesjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Konsistensi, akuntabilitas dan transparansi merupakan tiga pilar manajemen keuangan mesjid yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada
3. Mesjid adalah tempat ibadah sekaligus pusat peradaban umat islam. Dalam mengelola mesjid yang perlu mendapat perhatian adalah masalah keuangan dan surat menyurat. Pengurus mesjid harus sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan masalah ini, terutama masalah pengelolaannya. Kalau pengelolaan keuangan mesjid dapat dilaksanakan secara baik, itu pertanda pengurus mesjid merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab
4. Masih ada mesjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal ini merupakan yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber dana yang diberikan pada mesjid sudah disalurkan dengan benar. Oleh karena itu, mesjid sebagai salah satu organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak.
5. Pengelolaan sumber dana mesjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan mesjid ikatan akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peran penting sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK

### **C. Batasan Masalah**



Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi batasan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti agar penelitian lebih fokus. Penelitian ini difokuskan untuk melakukan analisis Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsistensi Pengelolaan Keuangan Masjid Agung At-Taqwa Aceh Tenggara ?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Agung At-Taqwa Aceh Tenggara ?
3. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Agung At-Taqwa Aceh Tenggara?

#### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsistensi Pengelolaan Keuangan Yang Ada Di Masjid Agung At-Taqwa Aceh Tenggara .
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yang Ada Di Masjid Agung At-Taqwa Aceh Tenggara .
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Yang Ada Di Masjid Agung At-Taqwa Aceh Tenggara

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai pelaporan keuangan masjid yang harus konsistensi, akuntabilitas dan transparansi yang berdasarkan.

- b. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada didalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan serta pemerintah secara umum.

c. Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN